



# Sembilan SKPD Terbelit Perjalanan Fiktif



Eddy Black, @PusatPR



Ir H Setiman H Sudin, @KalselPR

**SANGGAU.** Sebanyak sembilan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Sanggau 'bermain' dengan uang perjalanan dinas. Caranya uang diambil, tapi tak berangkat alias fiktif.

Mirisnya, angka tersebut totalnya dari sembilan SKPD itu, mencapai Rp 1,8 miliar lebih. Hal itu terungkap dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP-BPK RI) perwakilan Kalbar, terkait dengan rincian realisasi belanja dinas pada SKPD Pemkab Sanggau tahun anggaran 2012.

Pembuktian pemeriksaan BPK-RI ini, dilaksanakan secara uji petik atas bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah, berupa tiket pesawat pada sembilan SKPD itu yakni Sekretarisat DPRD (Setwan), Sek-

retariat Daerah (Setda), Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan (Distankanak), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM (Disperindagkop), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).  
Bukti-bukti lain oleh BPK-RI di antaranya berupa bukti Surat Tugas (ST), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Buku Kas Umum (BKU), kwitansi pembayaran perjalanan dinas, tiket pesawat dan boarding pass.

Dari hasil pengujian tiket pesawat ke dokumen manifest pesawat ditemukan adanya ketidak-sesuaian data penerbangan yang tercantum pada tiket. Lan-

tas masih dalam dokumen itu, keterangan dari masing-masing pegawai atau pejabat terkait di lingkungan Setwan (termasuk anggota dewan), Setda, Distankanak, ESDM, Disperindagkop, Dishubkominfo, Dinkes, BKD dan Bappeda pada tanggal 10 sampai dengan 16 April 2013 lalu. Diketahui terdapat 137 pegawai atau pejabat yang tidak dapat menunjukkan bukti sah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp1.799.315.400,00.

Sementara uji petik yang dilakukan pada tanggal 10 sampai dengan 16 April 2013 diketahui pula terdapat 3 pegawai yang menaikkan harga tiket saat melaksanakan perjalanan dinas sebesar Rp2.293.500,00.

Bupati Sanggau Ir H Setiman H Sudin tak menampik adanya temuan BPK-RI terkait dengan perjalanan dinas tersebut. Pi-

haknya hingga sekarang masih menunggu rekomendasi dari BPK-RI, terkait dengan hal itu, apakah dilaksanakan pengembalian ke negara atau ada sanksi lain. "Ya, saya sudah tahu tentang LHP BPK-RI itu, karena masih menunggu rekomendasi dari BPK-RI itu sendiri, terkait bagaimana pertanggungjawabannya dana itu nanti, tegasnya, dihubungi via telepon selulernya, Kamis (22/8).

Secara gableng dan lugas Setiman mengungkapkan, diakhir masa jabatannya sebagai orang nomor satu di Bumi Dara Nante, semua penggunaan anggaran maupun pelaporan harus baik dan tak bermasalah. "Saya wanti wanti itu pada semua SKPD, agar penggunaan anggaran dan pelaporan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini tahun terakhir saya, makanya saya mau harus

baik semua, sehingga tidak ada masalah," pungkasnya. Terpisah Eddy Siswanto, ketua Lembaga Pemberantasan Jaring-gan Korupsi (LPJK) Kabupaten Sanggau menilai, munculnya dana perjalanan fiktif itu, karena ketidakpatuhan oknum terhadap hukum yang berlaku. "Kalau perkara tahu, mereka jelas tahu lah aturan bagaimana, tapi sengaja dilanggar karena hanya untuk uang. Ini merupakan ketidakpatuhan mereka terhadap aturan, uang kecil saja disikat, apalagi yang besar," tukasnya. Ia meminta Bupati Sanggau, Ir H Setiman H Sudin untuk tegas bersikap, bagaimana pun ulah para oknum itu, telah mengotori laporan penggunaan APBD Sanggau Tahun 2012 lalu.

"Kalau perlu Bupati memberikan sanksi pada mereka-mereka itu, sesuai dengan aturan yang berlaku," pintanya. (SfY)